

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ❖ Riwu Kaho, Josep. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Center for Politics and Government (PolGov). 2012
- ❖ Irtanto. *DINAMIKA POLITIK LOKAL ERA OTONOMI DAERAH (Konflik Elit Politik Lokal dalam Proses Pilkada Kabupaten Banyuwangi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- ❖ Imawan, Riswanda. *Desentralisasi, Demokrasi dan Pembentukan Good Governance* dalam Jurnal Ilmu Politik No 18 (Konflik dan Kinerja Pemda). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). 2002
- ❖ Khoirudin. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia*. Malang: Averroes Press. 2005
- ❖ Hoessein. Bhenyamin, dkk. *Pasang-Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Institute For Local Development Yayasan Tifa. 2005
- ❖ Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UII. 2002
- ❖ Haryanto. *Elit, massa dan konflik*. Yogyakarta: PAU - Studi sosial UGM. 1994
- ❖ Prof. Dr Alo Liliweri. *Prasangka dan konflik: Komunikasi lintas budaya masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS. 2005

- ❖ Urbaningrum, Anas. *Ranjau-Ranjau Reformasi: Portret Konflik Politik Pasca Kejatuhan Soeharto*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999
- ❖ Surbakti, Ramlam. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. 1992
- ❖ Nurhadi. *Mengembangkan Jaminan Sosial, Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana. 2007
- ❖ Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, “*Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal*” dalam *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press. 2007
- ❖ Dean G. Pruitt-Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- ❖ FX. Hadi Rudyatmo. *Pemimpin Adalah Pelayan*.
- ❖ Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Tahun 2012

Laporan Penelitian

- ❖ Laporan Akhir *Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta*. Kerjasama Pemerintah Koya Yogyakarta dengan Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM. Yogyakarta. 2004
- ❖ Laporan penelitian Jurusan Politik Pemerintahan (JPP) dan Lembaga Kerjasama UGM. 2012

Peraturan Perundang-Undangan

- ❖ Undang-undang No. 5 Tahun 1974
- ❖ Undang-undang No. 22 Tahun 1999
- ❖ Undang-undang No. 32 Tahun 2004
- ❖ Undang-undang No. 33 Tahun 2004
- ❖ Peraturan Walikota Surakarta Tentang Program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) Tahun 2008
- ❖ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 38 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Koran

- ❖ Solopos. Senin 22 Desember Tahun 2008, tentang SBY: Jelaskan Alasan Tolak PNPM!.
- ❖ Suara Merdeka. Jum'at, 28 November 2008. Tentang *Pemkot Tak Bersedia Beri Dana Pendamping (Untuk Pelaksanaan PNPM)*.

Website

- ❖ *Presiden pada Pembukaan Munas KADIN "Aneh, Ada Bupati Yang Menolak PNPM", dalam <http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2008/12/21/3850.html> diunduh pada hari rabu. 23 Maret 2011, pukul 15.00 Wib*

- ❖ Dr. Adi Sulistyono, SH, M.Hum, dkk, dalam Laporan penelitian Seri Ringkasan Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun II HUKUM DAN KEBIJAKAN KEMISKINAN: Studi Tentang Produk Legislatif Daerah sebagai Sarana Penanggulangan Kemiskinan , 2005. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id> diakses pada 14 april 2012.

Wawancara

- ❖ Bapak. FX. Hadi Rudyatmo Walikota Surakarta tahun 2012-2015
- ❖ Bapak. Suratna dari Bappeda Kota Surakarta
- ❖ Bapak. Bagus Ardiyan Koordinator PNPM MP Kota (TKPKD).
- ❖ Ibu. Diah, ketua LKM kelurahan Pajang - laweyan
- ❖ Bapak. Kun Prastowo, Ketua LKM/BKM Kelurahan Jebres - Jebres
- ❖ Bapak. Adi Cahyo, Tokoh Masyarakat
- ❖ Bapak. Shemy, Tokoh Masyarakat Kecamatan Serengan